

**FAKTOR PENDORONG PIHAK YANG MENYEWAKAN MOBIL  
MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MOBIL MELALUI PIHAK KEPOLISIAN**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**VIVY PRANAVIONITA**

**NIM. 0910113045**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Artikel Ilmiah** : **FAKTOR PENDORONG PIHAK YANG MENYEWAKAN MOBIL MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MOBIL MELALUI PIHAK KEPOLISIAN**

**Identitas Penulis**

<b>a. Nama</b>	<b>Vivy Pranavionita</b>
<b>b. NIM</b>	<b>0910113045</b>
<b>Konsentrasi</b>	<b>Hukum Perdata Murni</b>
<b>Jangka Waktu Penelitian</b>	<b>6 Bulan</b>

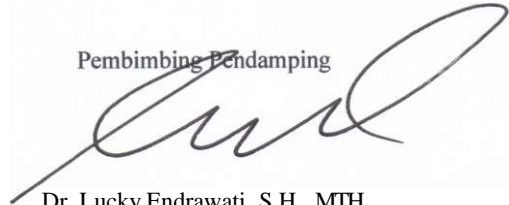
Disetujui pada tanggal: 6 Februari 2013

Pembimbing Utama



Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP. 19721130 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

# **FAKTOR PENDORONG PIHAK YANG MENYEWAKAN MOBIL MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MOBIL MELALUI PIHAK KEPOLISIAN**

Vivy Pranavionita

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: vpranavionita@yahoo.com

Djumikasih, S.H., M.H.; Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

## **Abstrak**

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa pernah terjadi pada persewaan mobil di wilayah Kota Madiun. Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak persewaan mobil adalah melalui upaya hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, padahal seharusnya menggunakan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengetahui, mendeskripsikan, dan menguraikan faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, dan untuk menganalisa dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi karena pihak yang menyewakan mobil tidak dapat membedakan klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata, seperti wanprestasi maupun hukum pidana, seperti penggelapan mobil sewaan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi hanya memfasilitasi pihak persewaan mobil dan pihak penyewa melalui upaya musyawarah mufakat.

Kata kunci: faktor pendorong, upaya penyelesaian, wanprestasi, perjanjian sewa mobil

### ***Abstract***

*Defaulting of car-leasing agreement done by tenants has ever happened to car-rentals in Madiun. The car rentals bring the lawsuit as criminal case to the police; however, it should be civil law which brings to the district court in Madiun. This study aims to identify, to know, to describe and to explain factor which lead the car-rentals to solve the defaults in car-leasing agreement through criminal law; and also to analyze fundamental law as the guideline to solve the problem. The research design is empirical research using sociological juridical approach with qualitative descriptive method. The result shows that factor leading the car-rentals to solve the defaults in car-leasing agreement through criminal law is because the car-rentals cannot distinguish classification between areas of civil law such as the default, and criminal law, like rent-car embezzlement. Besides, this study finds that the police does not have fundamental rule to solve the problem, but they facilitate between the rentals and the tenant to meet the consensus.*

*Keywords: leading factors, solving effort, default, car-leasing agreement*

## Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi khususnya yang melalui jalur darat semakin meningkat, mengingat tuntutan mobilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat di jaman modern ini. Kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut dituntut tersedianya anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki maupun melakukan perawatan terhadap sarana transportasi yang dibutuhkan tersebut.<sup>1</sup>

Adanya keadaan tersebut, maka terbukalah peluang bagi pihak yang ingin mencoba peruntungan di bidang jasa transportasi dengan membuka persewaan mobil yang merupakan suatu kegiatan yang didasari atas adanya perbuatan sewa-menyewa. Salah satunya adalah di Kota Madiun, banyak yang menggunakan kesempatan tersebut dengan membuka peluang usaha persewaan mobil karena mengingat banyaknya permintaan dari pihak penyewa terhadap kebutuhan sarana transportasi berupa mobil.

Perbuatan sewa-menyewa yang dilakukan pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yaitu perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa mobil yang nantinya akan melatarbelakangi timbulnya suatu prestasi<sup>2</sup> yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Prestasi yang muncul di antara kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa, yaitu pihak yang menyewakan mobil memiliki prestasi<sup>3</sup> untuk memelihara barang (mobil) yang hendak disewakannya sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak penyewa, menyerahkan barang (mobil) yang disewakan kepada pihak penyewa, serta memberi pihak penyewa kenikmatan yang tentram selama masa sewa berlangsung, sedangkan prestasi

---

<sup>1</sup> Agus Suki Widodo, **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Surakarta**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004, hal 1.

<sup>2</sup> Maksud dari prestasi di sini adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" (masa) dan "*condition*" (kondisi) sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Munir Fuady, **Hukum Kotrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 87.

<sup>3</sup> Prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh pihak yang menyewakan (persewaan mobil) tercantum di dalam ketentuan Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Perdata.

pihak penyewa<sup>4</sup> adalah memakai barang (mobil) yang disewanya dengan baik dan sesuai tujuan yang diberikan pada barang (mobil) itu menurut perjanjian sewanya, kemudian membayar harga sewa mobil sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dan berprestasi untuk mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa mobil.

Apabila pihak penyewa melaksanakan kewajibannya atau prestasinya, maka tujuan tersebut tercapai dan hal tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi seringkali tujuan tersebut tidak tercapai karena kesalahan<sup>5</sup> pihak penyewa, maka pihak penyewa dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi<sup>6,7</sup>. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>8</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum<sup>9</sup>. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:<sup>10</sup>

1. Pemenuhan perjanjian;

---

<sup>4</sup> Prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh pihak penyewa tercantum di dalam ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat: a) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan; b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian saja. R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Penerbit Binacipta Anggota IKAPI, Bandung, 1987, hal 17.

<sup>6</sup> Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Selain itu, yang dimaksudkan dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Subekti, **Hukum Perjanjian Cetakan ke XII**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal 45.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Definisi akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum (hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di depan Pengadilan. Hal ini dikemukakan oleh Asis Safioedin, **Beberapa Hal Tentang Bugarlijk Wetboek**, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 114.

<sup>10</sup> Subekti, *op.cit*, hal 53.

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi<sup>11</sup>, sehingga oleh hukum<sup>12</sup> diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>13</sup>

Hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan mobil di Kota Madiun. Berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Resort Madiun Kota, apabila terjadi permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil, maka upaya yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan mobil adalah melaporkannya kepada pihak kepolisian<sup>14</sup> Resort Madiun Kota atau menempuh upaya hukum pidana, dan bukan melakukan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Jadi, karena itulah penulis merasa penting melakukan penelitian mengenai “Faktor Pendorong Pihak yang menyewakan mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian”.

---

<sup>11</sup> Maksud dari ganti kerugian ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai, hal ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 39. Menurut Pasal 1246 B.W. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu: 1) kerugian yang nyata-nyata diderita; 2) keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian “biaya”, “kerugian” dan “bunga”. “Biaya” adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. “Kerugian” adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat daripada ingkar janji dan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji, menurut pendapat dari R. Setiawan, *op.cit*, hal 23.

<sup>12</sup> Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu, pendapat ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 7.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hal 87-88.

<sup>14</sup> Kepolisian merupakan salah satu lembaga Pemerintah yang memiliki peranan penting dalam Negara hukum. Di Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, selain itu faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 1.

## Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian?
2. Dasar pengaturan apa yang dapat dijadikan pedoman bagi Kepolisian untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil?

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer berupa keterangan, informasi, opini atau pendapat yang diperoleh dengan cara wawancara<sup>15</sup>, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang *valid* atau cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>16</sup> Responden atau narasumber atau informan yang dimaksudkan adalah:

- a. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota (Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Madiun Kota);
- b. Tiga anggota Reskrim (anggota Polisi yang bertugas di bagian Reserse Kriminal); dan
- c. Tiga orang dari persewaan mobil di Kota Madiun.

Jenis data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan<sup>17</sup> yaitu dengan cara mengutip catatan, karya-karya

---

<sup>15</sup> Teknik pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini menggunakan golongan wawancara yang berencana (berpatokan), yaitu di mana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner), kemudian membacakan pertanyaan yang telah disusun, dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 96.

<sup>16</sup> Mukti fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 160-161.

<sup>17</sup> Teknik studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori dari permasalahan penelitian. *Ibid*.



tulis yang bersifat kualitatif<sup>18</sup> maupun kuantitatif<sup>19</sup>, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, serta Undang-Undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif<sup>20</sup>.

## Pembahasan

### 1. Faktor Pendorong Pihak yang menyewakan mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian

Berikut ini merupakan uraian mengenai faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian:

#### a. Carter Mobil Setia Budi *Rent Car*

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil pernah terjadi di carter mobil Setia Budi *rent car*, dalam bentuk melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Pihak *rent car* hanya menyatakan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa adalah dalam bentuk melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Pihak penyewa tersebut tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang diperjanjikannya, serta tidak segera menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatannya kepada pihak *rent car*. Namun, apabila pihak penyewa segera menghubungi atau memberitahukan keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya kepada pihak *rent car*, maka pihak penyewa tidak dikatakan melakukan tindakan wanprestasi karena telah

---

<sup>18</sup> Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 98.

<sup>19</sup> Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu *variable*. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala, tes, atau observasi. *Ibid*.

<sup>20</sup> Metode deskriptif kualitatif yaitu metode menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal, sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. *Ibid*, hal 98-100.

diperjanjikan dari awal bahwa apabila pihak penyewa merasa hendak mengalami keterlambatan pengembalian mobil sewaan dan ingin melakukan perpanjangan masa sewa, maka pihak penyewa diwajibkan untuk segera menghubungi atau memberitahukannya kepada pihak *rent car*. Tindakan pihak penyewa yang tidak melaksanakan suatu hal yang telah diperjanjikannya dengan pihak *rent car* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila pihak penyewa tidak segera mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang diperjanjikan, serta tidak segera menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatannya kepada pihak *rent car*, maka pihak *rent car* akan menunggu sampai dua hari setelah masa sewa berakhir. Setelah lebih dari dua hari pihak penyewa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan mobil yang disewanya ataupun tidak menghubungi/memberitahukan alasan keterlambatannya, maka pihak *rent car* hendak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian karena pihak *rent car* beranggapan bahwa pihak penyewa hendak menggelapkan mobil yang disewanya tersebut. Namun, pihak *rent car* menyadari bahwa tindakan pihak penyewa tersebut merupakan tindakan wanprestasi, jadi pihak *rent car* berpendapat bahwa terdapat unsur tindak pidana dalam permasalahan wanprestasi tersebut. Kenyataannya, permasalahan wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan tindak penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua permasalahan ini memiliki upaya penyelesaian yang berbeda.

Pihak *rent car* belum mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Pihak *rent car* masih mencampuradukan permasalahan dalam lingkup hukum perdata ke dalam hukum pidana atau sebaliknya. Hal demikianlah yang menjadi faktor pendorong pihak carter mobil Setia Budi *rent car* melakukan upaya penyelesaian wanprestasi melalui pihak kepolisian.

Selain itu, pihak *rent car* juga kurang mengetahui macam-macam bentuk tindakan wanprestasi. Pihak *rent car* tidak mengetahui bahwa tindakan pihak penyewa yang tidak mampu menjaga dan memelihara mobil yang disewanya dengan baik merupakan salah satu bentuk tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya karena salah satu kewajiban pihak penyewa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pihak penyewa berkewajiban untuk memakai barang yang disewanya dengan baik. Pihak *rent car* menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberi denda kepada pihak penyewa terhadap kerusakan mobil sesuai ketentuan dalam perjanjian sewa mobil.

Pihak *rent car* juga menyampaikan bahwa wanprestasi sering terjadi, apabila pada saat melakukan sewa mobil pihak penyewa juga menggunakan jasa pengemudi atau sopir yang disediakan oleh pihak *rent car*. Berdasarkan pengalaman, mobil sewaan pernah tidak dikembalikan atau hilang apabila pihak penyewa menggunakan jasa pengemudi atau sopir ketika menyewa mobil di *rent car*-nya karena saat berlangsungnya masa sewa pengemudi atau sopir yang disediakan oleh pihak *rent car* tersebut ada yang dibius kemudian diturunkan di jalan, atau bahkan ada yang sampai dibunuh oleh pihak penyewa, tetapi yang sering terjadi adalah dibius kemudian diturunkan di jalan. Hal tersebut merupakan modus yang dilakukan untuk menguasai dan memiliki mobil yang disewanya tersebut. Tindakan semacam itu merupakan tindak kejahatan dalam lingkup hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 mengenai tindak penganiayaan yang dengan unsur kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, diatur juga dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak penganiayaan yang dapat menjadikan matinya orang, yang kemudian terkait dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan).

Jadi, dengan adanya peristiwa dibalik tidak dikembalikannya mobil sewaan inilah yang menjadi alasan pihak carter mobil Setia Budi *rent car* melaporkan permasalahan wanprestasi tersebut kepada pihak kepolisian.

b. Rental Mobil “RM” Serayu Oli

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil pernah terjadi di rental mobil “RM” Serayu Oli dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Menurut pihak rental mobil tidak pernah terjadi permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap rental mobilnya karena pihak rental mobil merasa sudah mengantisipasi (tindakan *preventif*) terhadap celah-celah bagi pihak penyewa yang hendak merugikannya, serta pihak rental mobil sudah mempelajari sebelumnya agar tidak terjadi permasalahan wanprestasi ataupun tindakan dari pihak penyewa untuk menggelapkan mobil yang disewanya.

Meskipun demikian, pernah terjadi keterlambatan pengembalian mobil sewaan yang tidak disertai dengan tindakan untuk menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil sewaan kepada pihak rental mobil. Namun, pihak rental mobil menyikapi tindakan tersebut dengan menunggu selama 1x24 jam (satu hari) setelah masa sewa jatuh tempo/berakhir, kemudian pihak rental mobil hendak menghubungi pihak penyewa. Apabila setelah lebih dari 1x24 jam pihak penyewa tidak dapat dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya ataupun untuk mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, maka pihak rental mobil hendak mematikan GPS yang telah terpasang di dalam mobil sewaan tersebut agar mobil sewaan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan lagi. Kemudian, pihak rental mobil hendak menghubungi/meminta bantuan pihak kepolisian di daerah yang ditunjukkan oleh GPS untuk segera mengamankan mobil sewaan tersebut. Pihak rental mobil, tidak meneruskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui upaya hukum pidana karena mobil sewaan dapat

ditemukan, tetapi apabila pihak penyewa mempunyai modus atau cara lain untuk menguasai dan memiliki mobil yang disewanya tersebut padahal GPS sudah dimatikan, maka pihak rental mobil hendak menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut melalui pihak kepolisian.

Pihak rental mobil mengklasifikasikan bahwa wanprestasi merupakan suatu tindakan dalam bentuk tidak mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang telah disepakati dan tidak dapat dihubungi oleh pihak rental mobil apabila masa sewa telah jatuh tempo (berakhir).

Tindakan pihak penyewa yang tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang ditentukan, tetapi disertai dengan tindakan mengembalikan mobil yang disewanya setelah masa sewa berakhir merupakan tindakan wanprestasi dalam bentuk melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Apabila terdapat tindakan tidak mengembalikan mobil yang disewanya karena adanya niatan buruk pihak penyewa untuk menguasai dan memiliki barang (mobil) tersebut, maka tindakan pihak penyewa tersebut menyalahi ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-menyewa yang bermakna bahwa pihak penyewa berhak atas kenikmatan barang (mobil) yang disewanya saja, sedangkan hak kepemilikan barang (mobil) sewaan tetap berada pada tangan pihak rental mobil. Selain itu, pihak penyewa dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penggelapan mobil sewaan karena dengan sengaja ingin memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Selain keterlambatan pengembalian mobil sewaan, pernah terjadi juga kerusakan pada mobil yang disewa pihak penyewa. Namun, pihak rental mobil tidak mengetahui bahwa hal tersebut termasuk tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk menjaga dan memakai mobil yang disewanya dengan baik. Pihak rental mobil menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan denda kepada pihak penyewa sesuai kerusakan yang terjadi pada mobil sewaan tersebut.

Faktor pendorong pihak rental mobil “RM” Serayu Oli melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian dikarenakan pihak rental mobil tidak mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata seperti wanprestasi maupun kasus tindak kejahatan dalam lingkup hukum pidana seperti tindak penggelapan mobil sewaan. Selain itu, pihak rental mobil juga kurang mengetahui macam-macam bentuk tindakan wanprestasi.

c. Surabaya *Rent Car*

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil pernah terjadi di Surabaya *Rent Car* dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Menurut pihak *rent car*, ciri-ciri pihak penyewa yang hendak melakukan suatu tindakan wanprestasi adalah dengan memperpanjang masa sewa yang alasannya karena masih berada di luar Kota. Kebanyakan pihak penyewa yang memiliki alasan tersebut, apabila tidak ditanya atau dihubungi terlebih dahulu oleh pihak *rent car*, maka tidak segera memberi kabar atau memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil sewaan. Hal tersebut, menurut pihak *rent car* merupakan itikad buruk dari pihak penyewa.

Permasalahan wanprestasi yang terjadi adalah dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil sewaan. Selain itu, dalam bentuk melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, yaitu keterlambatan untuk mengembalikan mobil sewaan. Apabila pihak penyewa melaksanakan kewajibannya untuk menghubungi atau memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil sewaan, maka pihak penyewa tidak dikatakan melakukan suatu tindakan wanprestasi karena sudah diperjanjikan sebelumnya dan sudah menjadi Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terkait. Hal tersebut merupakan cerminan dari salah satu asas perjanjian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yaitu asas *pacta sun servanda* (asas kepastian hukum) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”. Apabila pihak penyewa melanggar perjanjian sewa mobil yang telah disepakatinya dengan pihak *rent car* tersebut, maka pihak penyewa dalam keadaan wanprestasi.

Mengenai itikad buruk pihak penyewa yang disampaikan oleh pihak *rent car* merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan salah satu asas perjanjian yaitu asas itikad baik yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak *rent car* lebih memilih menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui upaya musyawarah dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan daripada melakukan upaya hukum perdata karena pendekatan secara kekeluargaan dirasa lebih efektif daripada menempuh upaya hukum perdata. Akan tetapi, apabila timbul permasalahan baru yang dikarenakan adanya tindakan pihak penyewa yang tidak mengembalikan mobil yang disewanya, maka pihak *rent car* hendak menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian karena pihak *rent car* menganggap pihak penyewa hendak menggelapkan mobil yang disewanya tersebut. Meskipun tindak penggelapan mobil sewaan diselesaikan melalui upaya hukum pidana, pihak *rent car* tetap meminta ganti rugi kepada pihak penyewa atas tindakan wanprestasi yang diperbuatnya.

Pihak *rent car* mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana, tetapi pihak *rent car* tidak mengetahui bahwa selain keterlambatan mobil sewaan ada juga bentuk wanprestasi lain yang pernah terjadi di *rent car*-nya, yaitu kerusakan mobil yang dikarenakan kesalahan pihak penyewa. Akan tetapi, pihak *rent car* sudah mencantumkan dalam perjanjian sewa mobil mengenai ketentuan denda terhadap kerusakan mobil.

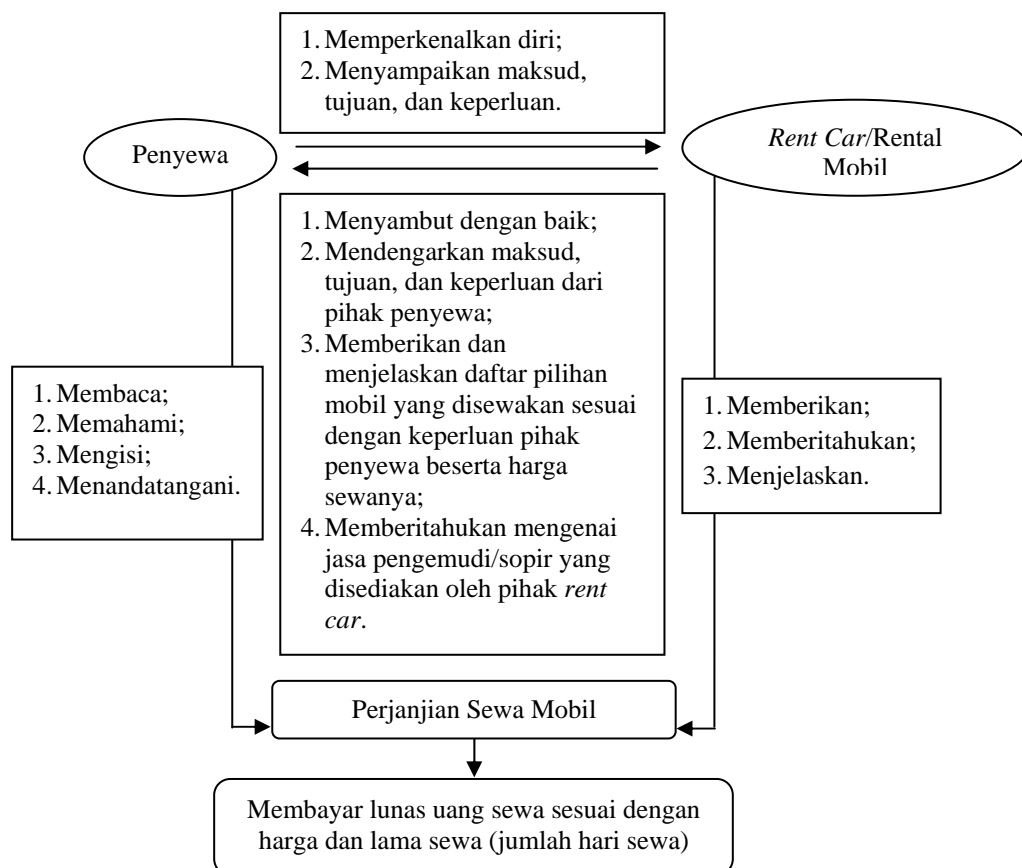
Selain permasalahan wanprestasi, di Surabaya *rent car* juga pernah terjadi tindakan penggadaian mobil sewaan yang diketahui oleh pihak *rent car* dengan cara menyelidiki sendiri terlebih dahulu, kemudian dilaporkan

kepada pihak kepolisian. Pihak penyewa menggadaikan mobil yang disewanya kepada orang lain yang bukan dari suatu perusahaan pegadaian resmi.

Tidak berbeda jauh dengan tindak penggelapan mobil sewaan, tindakan penggadaian mobil sewaan merupakan suatu tindak kejahatan, karena ada itikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari barang milik orang lain.

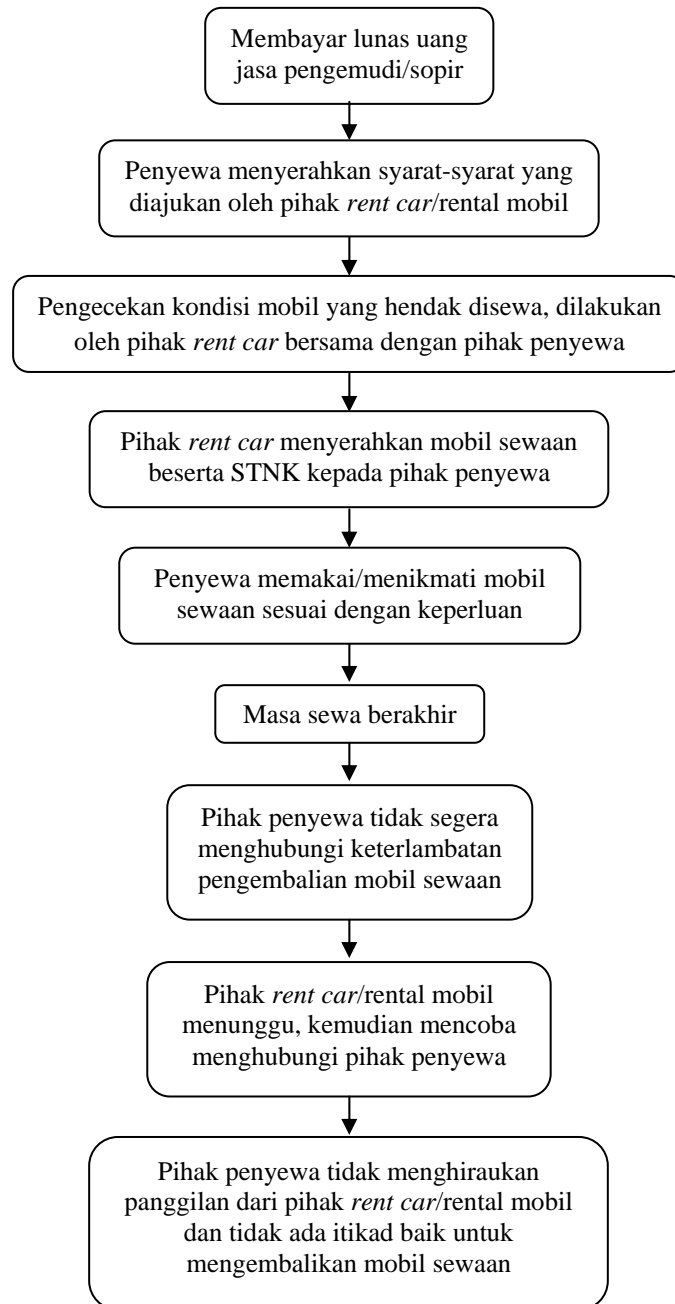
Faktor pendorong pihak Surabaya *rent car* melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian adalah karena adanya tindakan pihak penyewa yang mengarah ke tindak penggelapan mobil sewaan, sedangkan permasalahan wanprestasi tetap diselesaikan melalui upaya musyawarah ataupun dengan memberikan denda kepada pihak penyewa yang telah melakukan tindakan wanprestasi.

**Gambar**  
**Alur Sewa Mobil sampai dengan Terjadinya Permasalahan Wanprestasi**





↓  
*Lanjutan Alur Sewa Mobil sampai dengan Terjadinya Permasalahan Wanprestasi ...*



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

2. Dasar Pengaturan yang Dapat Dijadikan Pedoman Bagi Kepolisian untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil

Berikut ini uraian mengenai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi Kepolisian untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil:

Pihak kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil termasuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor juga tidak mengatur mengenai tugas dan wewenang pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi pihak kepolisian tetap menerima laporan dari pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) dan menyelesaikannya dengan memfasilitasi pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa) melalui upaya musyawarah agar kedua pihak menemukan kata sepakat. Apabila sudah melakukan upaya tersebut tetapi tidak dapat menemukan kata sepakat, maka pihak kepolisian hendak menyarankan kepada pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) untuk menempuh upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.

Laporan yang diajukan pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) kepada pihak kepolisian bukanlah mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil, melainkan mengenai kasus tindak penggelapan mobil sewaan yang dilakukan pihak penyewa. Permasalahan wanprestasi ditemukan oleh pihak kepolisian setelah melalui proses penyelidikan, begitu juga dengan kebenaran mengenai laporan tindak penggelapan mobil sewaan. Apabila benar ditemukan kasus tindak penggelapan mobil sewaan, maka pihak kepolisian hendak melanjutkan ke proses penyidikan, tetapi apabila tidak ditemukan kasus tindak penggelapan mobil sewaan dan hanya ditemukan permasalahan

wanprestasi, maka pihak kepolisian hendak memfasilitasi melalui upaya musyawarah mufakat kepada pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa).

Meskipun pihak kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan wanprestasi, cara pihak kepolisian menyikapi permasalahan tersebut yang muncul setelah proses penyelidikan dengan memfasilitasi pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa) melalui upaya musyawarah mufakat, sudah mencerminkan salah satu kewajiban pihak kepolisian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Faktor pendorong pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) tidak mengetahui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Perhatian pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) hanya pada tindak penggelapan mobil sewaan karena adanya tindakan dari pihak penyewa yang tidak segera memberitahukan alasan keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya ataupun tidak mengembalikan mobil yang disewanya. Selain itu, karena pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) belum mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) masih sering mencampuradukan permasalahan dalam lingkup hukum perdata ke dalam hukum pidana ataupun sebaliknya. Kebanyakan yang menjadi alasan dari pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) melaporkan pihak penyewa

kepada pihak kepolisian, yaitu karena pihak *rent car*/rental mobil menganggap bahwa tindakan pihak penyewa yang tidak segera memenuhi kewajibannya tersebut merupakan itikad buruk pihak penyewa untuk menguasai dan memiliki mobil yang disewanya. Pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) seringkali tidak memperhatikan kelalaian yang dilakukan pihak penyewa, hanya saja yang menjadi perhatian pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) adalah tindak penggelapan mobil sewaan yang dilakukan pihak penyewa. Meskipun demikian, pihak *rent car*/rental mobil tetap memperhatikan kerugian yang dialaminya karena tindakan pihak penyewa.

- b. Kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil. Tugas dan wewenang Kepolisian hanya sebatas dalam lingkup hukum pidana, tetapi karena salah satu kewajibannya yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, maka walaupun pihak kepolisian tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi, pihak kepolisian tetap diwajibkan untuk memperhatikan dan menyelesaikan laporan masyarakat yang khususnya dalam penelitian ini adalah pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil), dengan memfasilitasi pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) dan pihak terlapor (penyewa) melalui upaya musyawarah agar dapat menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak. Apabila upaya musyawarah tidak dapat menemukan kata sepakat, maka pihak kepolisian hendak menyarankan kepada pihak pelapor (*rent car*/rental mobil) untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut melalui upaya hukum perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat.

## 2. Saran

- a. Pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) sebaiknya memiliki tindakan *preventif* untuk mencegah terjadinya permasalahan wanprestasi. Selain itu, pihak *rent car*/rental mobil (persewaan mobil) hendaknya mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana, agar permasalahan yang dialaminya tersebut dapat diselesaikan sesuai upaya hukum/jalur penyelesaian dari masing-masing permasalahan.
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia hendaknya memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai wenang atau tidaknya pihak Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Adanya dua permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu permasalahan wanprestasi dan kasus tindak penggelapan mobil sewaan, seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum yang khususnya dalam penelitian ini adalah Kepolisian, untuk dapat menyempurnakan penegakan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, agar dapat terselesaikan sesuai jalurnya dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Asis Safioedin, **Beberapa Hal Tentang *Burgerlijk Wetboek***, Bandung, Penerbit Alumni, 1982.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Munir Fuady, **Hukum Kotrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mukti fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bandung, Penerbit Binacipta Anggota IKAPI, 1987.

Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri Dan *Good Governance***, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008.

Subekti, **Hukum Perjanjian Cetakan ke XII**, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Bandung, Mandar Maju, 2000.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009.

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Bogor, Politeia, 1993.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian**, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2003.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

#### **Tesis**

Agus Suki Widodo, **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Surakarta**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004.